

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**RANCANG BANGUN APLIKASI KONTROL PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Tahun 1 dari rencana 1 tahun**

KETUA/ ANGGOTA TIM

Tajuddin Abdillah, S.Kom., M.Cs (Ketua)

NIDN 0008127805

Mohamad Syafri Tuloli, ST., MT (Anggota)

NIDN 0025078202

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOPEMBER 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

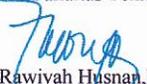
Judul Kegiatan : Rancang Bangun Aplikasi Kontrol Pengelolaan Keuangan Desa

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : TAJUDDIN ABDILLAH, S.Kom., M.Cs
NIDN : 0008127805
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Manajemen Informatika
Nomor HP : 08124466687
Alamat surel (e-mail) : tajuddin@ung.ac.id

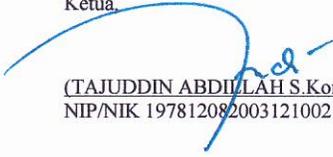
Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : Moh. Syafri Tuloli ST, MT.
NIDN : 0025078202
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Institusi Mitra (jika ada)
Nama institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 50.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 50.000.000,00

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik

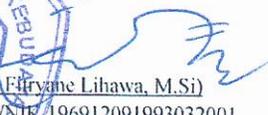

(Ir. Rawiyah Husnan, MT)
NIP/NIK 196404271994032001

Gorontalo, 11 - 11 - 2013,
Ketua,


(TAJUDDIN ABDILLAH S.Kom., M.Cs)
NIP/NIK 197812082003121002



Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


(Dr. Fitriyane Lihawa, M.Si)
NIP/NIK 196912091993032001

RINGKASAN

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan daerah dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat selayaknya menggunakan sebuah sistem yang mampu untuk melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang baik. Adapun masalah yang dihadapi saat ini adalah (1) sulitnya pemerintah desa dalam membuat rencana kebutuhan anggaran; (2) tidak terkontrolnya pengelolaan keuangan desa baik uang yang masuk (berasal dari bantuan pemerintah daerah, sumbangan pihak ketiga, pajak) dan uang yang keluar untuk belanja rutin; (3) keterlambatan pemasukan pertanggungjawaban keuangan oleh pihak desa yang disebabkan oleh hilangnya data rencana kerja pembangunan (RKP); (4) tidak sesuainya penggunaan anggaran oleh desa karena hilangnya dokumen rencana kerja desa.

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah terkontrolnya pengelolaan keuangan seluruh desa menggunakan aplikasi sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan dalam bidang keuangan dan penyaluran keuangan desa berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh pihak desa. Target khusus untuk penelitian ini adalah teridentifikasinya data pengelolaan keuangan desa serta terciptanya desain arsitektur dan aplikasi yang dapat mengontrol pengelolaan keuangan desa sehingga warehouse data dibidang keuangan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang dipakai adalah pengumpulan data, studi literatur, analisa sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe sistem, pemaparan prototipe aplikasi, penyempurnaan aplikasi, implementasi, pelatihan penggunaan aplikasi.

Kata Kunci : *Integrasi data, rencana kerja pembangunan, pengelolaan keuangan desa*

PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan Penelitian BOPTN Skim Hibah Bersaing dengan judul Rancang bangun aplikasi kontrol pengelolaan keuangan desa.

Adapun Laporan Kemajuan Penelitian tentang aplikasi kontrol pengelolaan keuangan desa ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar penyelesaian laporan ini. Pada laporan ini masih banyak yang harus diperbaiki terutama arsitektur dan aplikasi yang telah dibuat yang nantinya penyempurnaan tersebut akan dilakukan pada saat pembuatan laporan akhir, Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pengumpulan data sampai pembuatan laporan ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki laporan ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari laporan ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Gorontalo, Nopember 2013

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman pengesahan	1
Ringkasan.....	2
Prakata.....	3
Daftar isi.....	4
Daftar tabel.....	5
Daftar gambar	6
BAB 1. PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Pendukung	9
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah/Desa.....	9
2.1.2 Pengertian Web	10
2.1.3 Pengertian PHP	11
2.1.4 Hypertext Markup Language (HTML)	12
2.2 Acuan Primer dan Peta Jalan Penelitian.....	12
2.2.1 Acuan Primer	12
2.2.2 Peta Jalan Penelitian.....	15
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
3.1 Tujuan Penelitian	16
3.2 Manfaat Penelitian	16
BAB 4. METODE PENELITIAN	18
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI.....	24
5.1 Analisa sistem	24
5.1.1 Analisa sistem berjalan	24
5.1.2 Arsitektur Sistem yang Diusulkan	27
5.1.3 Sistem yang Diusulkan	29
5.2 Desain Sistem.....	31
5.2.1 Desain Sistem Secara Umum.....	31
5.2.2 Desain Input.....	33
5.2.3 Desain Output	37
5.2.4 Desain Database.....	40
5.3 Implementasi Sistem.....	42
5.3.1 Aplikasi Kantor BPMD.....	45
5.3.2 Aplikasi Kantor Desa.....	46
5.3.3 Aplikasi Badan Keuangan.....	47
5.3.4 Aplikasi Admin User	48
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	49
6.1 Kesimpulan	49
6.2 Saran	49
Daftar Pustaka.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Anggaran untuk uraian kegiatan	40
Tabel 5.2 Item anggaran.....	40
Tabel 5.3 Desa.....	40
Tabel 5.4 Kecamatan.....	41
Tabel 5.5 penggunaan anggaran.....	41
Tabel 5.6 User aplikasi.....	41
Tabel 5.7 Perbandingan sistem lama dan baru	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta jalan penelitian.....	15
Gambar 4.1 Bagan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian.....	22
Gambar 4.2 <i>Fishbone diagram</i> untuk tahapan penelitian	23
Gambar 5.1 Analisa Sistem Berjalan	26
Gambar 5.2 Pembuatan usulan RAPBDes	27
Gambar 5.3 Penggunaan keuangan desa	28
Gambar 5.4 Diagram Konteks.....	31
Gambar 5.5 DAD Level 0	32
Gambar 5.6 Tampilan desain input untuk form login	33
Gambar 5.7 Desain form input tahun anggaran	33
Gambar 5.8 Tampilan form input rekening.....	33
Gambar 5.9 Tampilan desain form status proposal per tahun anggaran	34
Gambar 5.10 Desafi form status proposal desa.....	34
Gambar 5.11 Tampilan form input RAPBDes	35
Gambar 5.12 Tampilan desain form status RAPBDes	35
Gambar 5.13 Tampilan status RAPBDes dalam proses verifikasi	35
Gambar 5.14 Desain form proses verifikasi oleh BPMD.....	36
Gambar 5.15 Desain form input hasil verifikasi	36
Gambar 5.16 Tampilan form informasi status RAPBDes	37
Gambar 5.17 Tampilan status laporan desa.....	37
Gambar 5.18 Tampilan form detail belanja kegiatan	38
Gambar 5.19 Tampilan desain laporan buku kas umum	38
Gambar 5.20 Tampilan desain laporan buku kas harian pembantu	38
Gambar 5.21 Tampilan desain laporan buku kas pembantu penerimaan.....	39
Gambar 5.22 Tampilan desain laporan buku kas pembantu pengeluaran.....	39
Gambar 5.23 Tampilan form login.....	42
Gambar 5.24 Menu utama untuk kantor BPMD	43
Gambar 5.25 Menu utama untuk kantor desa.....	43
Gambar 5.26 Menu utama untuk Badan Keuangan	44
Gambar 5.27 Menu utama untuk admin user	44
Gambar 5.28 Form input data kecamatan	45
Gambar 5.29 Form input data desa	45
Gambar 5.30 Form input data uraian kegiatan	45
Gambar 5.31 Penambahan uraian kegiatan oleh desa	46
Gambar 5.32 Form input anggran RAPBDes.....	46
Gambar 5.33 Tampilan form penggunaan anggran.....	47
Gambar 5.34 Tampilan informasi persetujuan RAPBDes	47
Gambar 5.35 Tampilan aplikasi administrasi pengguna aplikasi.....	48

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah merupakan sebuah entitas sosial politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia. Terwujudnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang otonomi daerah maupun otonomi desa mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan bagi pemerintahan desa. Dengan diberlakukannya otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sehingga memberikan peluang bagi terwujudnya kemandirian desa. Adapun dalam era otonomi daerah ini mensyaratkan kesiapan desa dalam menghadapi beragam tantangan, dimana Pemerintah Desa dituntut untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, seperti dalam hal perumusan kebijakan desa seperti Perdes dan APB Desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi desa yang sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa seperti dalam hal administrasi kependudukan dan kesehatan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran keuangan desa, baik keuangan yang bersumber dari bantuan pemerintah daerah maupun sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga atau pajak.

Dengan model pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini yakni berupa kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti sulitnya pemerintah desa dalam membuat rencana kebutuhan anggaran sebagai akibat dari tidak tersedianya pangkalan data keuangan di tingkat desa, masalah lainnya adalah tidak terkontrolnya pengelolaan keuangan desa baik uang yang masuk (berasal dari bantuan pemerintah daerah, sumbangan pihak ketiga, pajak) dan uang yang keluar untuk belanja rutin. Masalah lainnya yang terjadi adalah keterlambatan pemasukan pertanggungjawaban keuangan oleh pihak desa yang disebabkan oleh hilangnya data rencana kerja pembangunan (RKP), sehingga keterlambatan ini akan

berpengaruh pada pencairan dana untuk tahun berikutnya, dimana bentuk pertanggungjawaban desa harus sesuai rencana kerja yang telah dibuat dan diverifikasi oleh pihak BPMD. Terakhir masalah terkait dengan tidak sesuainya penggunaan anggaran oleh desa karena hilangnya dokumen rencana kerja desa.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat mengontrol pengelolaan keuangan desa sehingga terciptanya suatu prinsip akuntabilitas keuangan daerah secara lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Keberhasilan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) sangat tergantung pada kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan dilapangan, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang benar – benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana model pengelola keuangan desa yang ada dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo saat ini?
2. Bagaimana pembuatan rencana kerja pembangunan (RKP) yang ada didesa?
3. Apa saja laporan pertanggung jawaban keuangan yang harus dibuat oleh desa?
4. Bagaimana rancangan arsitektur aplikasi yang dapat diimplementasikan dalam aplikasi berbasis web?
5. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk mengontrol penggunaan keuangan desa?

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pendukung

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah/Desa

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, istilah otonomi desa lebih menekankan kepada aturan normatif, dimana desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Secara perspektif hukum dan politik pendekatan yang dilakukan lebih menekankan pada “struktur” pemerintahan desa, berbeda dengan pendekatan dalam perspektif sosial-ekonomi yang lebih menekankan pada “kultur” komunitas atau masyarakat desa.

Pemahaman tentang otonomi daerah berawal dari pemahaman tentang konsep local government, yang memiliki dua arti. Pertama adalah pemerintah yang seluruh bagian-bagiannya merupakan hasil penunjukan dan bertanggung jawab hanya pada pemerintah pusat. Kedua, adalah pemerintah lokal yang secara bebas dipilih, merupakan subjek bagi supremasi pemerintah nasional yang memiliki kewenangan untuk membuat dan sekaligus mengimplementasikan keputusan tanpa kontrol ketat dari pemerintah atasnya.

Secara teoritik pemahaman tentang otonomi daerah pada dasarnya memang tidak bisa terlepas dari pemahaman tentang desentralisasi. Pada umumnya konsep desentralisasi dipahami dari dua perspektif, yaitu politik dan administrasi. Dari perspektif politik, desentralisasi didefinisikan sebagai devolution of power dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal atau daerah. Adapun dari perspektif administrasi, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan, perencanaan dan pengaturan fungsi publik (public function) dari pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, kepada pemerintah dan organisasi non pemerintah yang berada pada jenjang yang lebih rendah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun, (Permendagri No. 37).

2.1.2 Pengertian Web

Secara teminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di dalam internet. Sebuah halaman web biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup Language), yang selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu sebuah protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser.

Halaman-halaman dari website dapat diakses melalui sebuah URL yang biasanya disebut Homepage. URL ini mengatur halaman situs untuk menjadi sebuah hirarki, meskipun hyperlink-hyperlink yang ada dihalaman tersebut mengatur para pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan.

2.1.3 Pengertian PHP

Hypertext PreProcessor atau dikenal dengan nama PHP merupakan salah satu aplikasi server yang sangat banyak digunakan sampai sekarang karena kemudahan dan keandalan yang dimilikinya. PHP pada mulanya dikembangkan hanya untuk mengantisipasi penggunaan database, namun kemudian dikembangkan menjadi aplikasi yang telah memiliki banyak fitur dalam mengembangkan aplikasi non database.

PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses data dinamis. Artinya, iya dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini (Kadir, 2009). Misalnya bisa menampilkan isi database kehalaman web. Pada prinsipnya PHP mempunyai fungsi yang sama dengan skrip-skrip ASP (Active Server page), Cold Fusion ataupun Pearl. Namun, perlu diketahui bahwa PHP sebenarnya bisa dipakai secara command line, artinya skrip PHP dapat dijalankan tanpa melibatkan web server maupun browser. Kode PHP juga bisa berkomunikasi dengan database dan melakukan perhitungan-perhitungan yang kompleks sambil jalan. PHP dikatakan sebagai sebuah server-side embedded script language artinya sintaks-sintaks dan perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server tetapi disertakan pada halaman HTML biasa (Sudarmanto, 2008). Aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh PHP pada umumnya akan memberikan hasil pada web browser, tetapi prosesnya secara keseluruhan dijalankan di server.

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain adalah :

- Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya.
- Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif mudah.
- Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.
- Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak.
- PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem.

2.1.4 *Hypertext Markup Language (HTML)*

HTML adalah bahasa standar untuk membuat tampilan web. HTML merupakan file teks yang terdiri dari tag-tag markup yang biasa digunakan dalam semua file-file yang berjalan diatas web browser. Atau dengan kata lain, HTML merupakan serangkaian konstruksi standar yang dapat membangun halaman web.

HTML merupakan pengembangan dari standar pemformatan dokumen teks, yaitu Standard Generalized markup Language (SGML). Halaman web ditulis dalam format HTML. HTML adalah plain text yang berisi HTML tags dan user-defined text fields. Plain text dapat dibuat dengan menggunakan Notepad, WordPad (Windows 95/98), Simple Text (Macintosh), Vi or pico (UNIX). Adapun untuk aplikasi pembangun HTML terdiri dari MS-FrontPage, Macromedia Dream Weaver, EditPlus, Adobe Golive, dll.

2.2 **Acuan Primer dan Peta Jalan Penelitian**

2.2.1 *Acuan Primer*

a. *Penelitian terdahulu*

Penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa** (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008) oleh Agus Subroto, Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan

kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

2. **Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*** (Studi pada pemerintah Desa Kalimook Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep) oleh Astri Furqani, Tesis Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kalimo'ok desa di kecamatan-kecamatan Kalianget Sumenep. Dari hasil penelitian tentang manajemen keuangan dari Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007. Sementara akuntabilitas sangat rendah karena karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa / Badan Permusyawaratan Desa). Dari hasil penelitian disarankan bahwa setiap proses manajemen keuangan desa dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Juga diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat desa dan kebutuhan untuk kembali sosialisasi Kalimo'ok dan pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

b. Penelitian saat ini (tahun 2013)

Penelitian yang direncanakan untuk dilakukan saat ini adalah **Membangun sebuah aplikasi berbasis web** yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh Permendagri Nomor 37/2007 dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa).

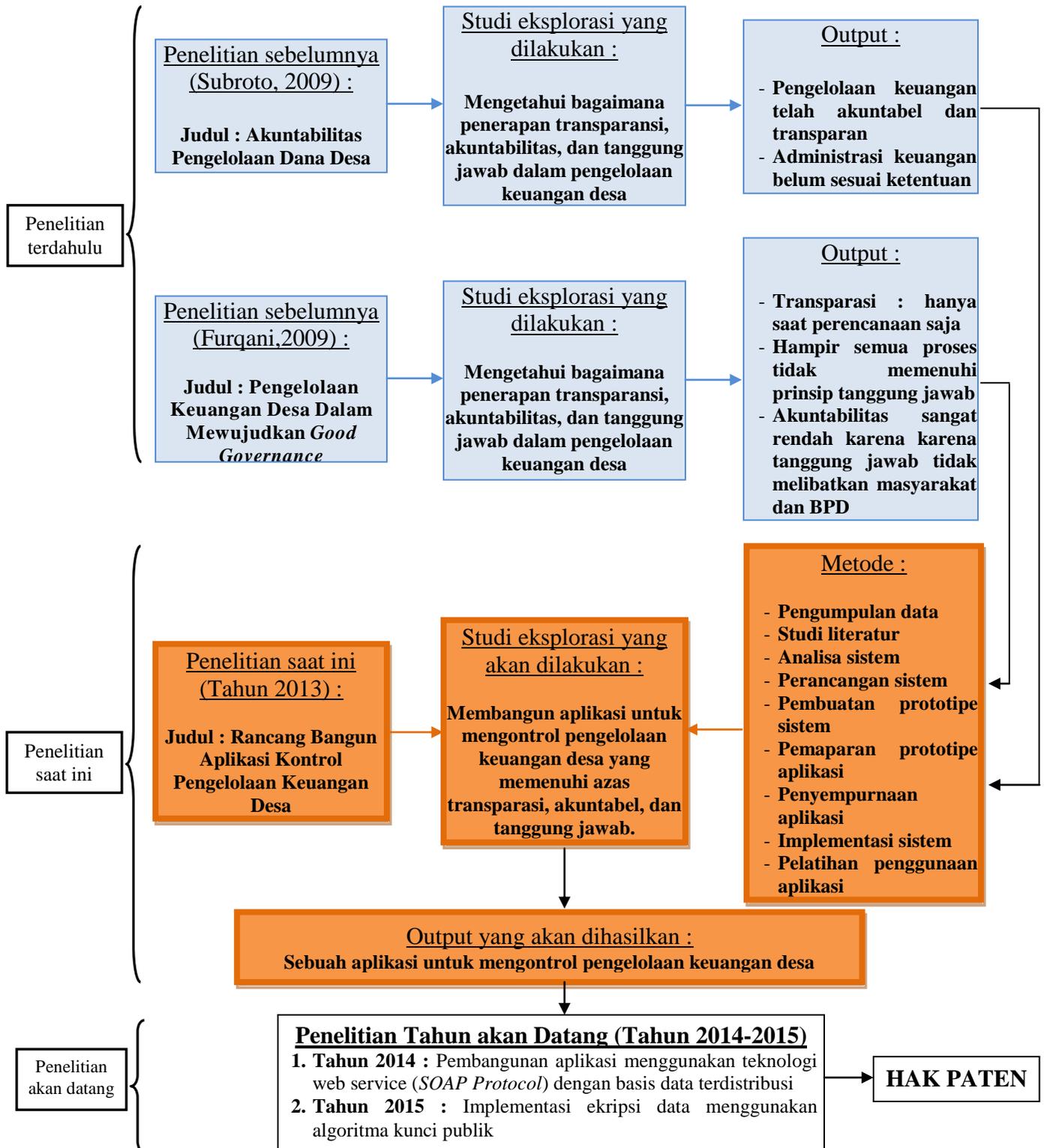
c. Penelitian tahun yang akan datang (tahun 2014-2015)

Untuk melanjutkan penelitian yang akan dilakukan saat ini (tahun 2013) maka rencana penelitian ditahun yang akan datang (2014-2015) di fokuskan pada :

1. **Tahun 2014** : Pembangunan aplikasi menggunakan teknologi web service (*SOAP Protocol*) dengan basis data terdistribusi. Target utama dari penelitian ini adalah :
 - Dengan basis data terdistribusi maka backup data ada dimana-mana sehingga kerusakan/ kehilangan data yang terjadi pada satu database masih dapat ditemukan pada database lainnya
 - Hasil verifikasi data oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) bisa diakses secara remote maupun secara lokal karena data tersimpan di database Kantor Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)
 - Memudahkan Badan Keuangan dalam memonitoring data terkait dengan jumlah desa yang sudah menerima pencairan dana alokasi desa
 - Dengan teknologi web service menggunakan protokol SOAP maka memungkinkan integrasi dan koneksi data dapat dilakukan dengan mudah.
2. **Tahun 2015** : Implementasi enkripsi data menggunakan algoritma kunci publik untuk setiap basis data yang ada di Kantor Desa, Badan Keuangan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Target utama dari penelitian ini adalah :
 - Dengan enkripsi kunci publik maka proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci berbeda
 - Tingkat keamanan data terjamin

2.2.2 Peta Jalan Penelitian

Uraian dalam sub bab 2.2.1 akan dijelaskan secara ringkas pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta jalan penelitian

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan keuangan desa yang ada dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis data hasil Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang dibuat dan diusulkan oleh desa.
3. Mempelajari format dan cara pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh desa
4. Merancang arsitektur sistem kemudian mengimplementasikannya dalam sebuah aplikasi berbasis web untuk pengontrolan penggunaan keuangan desa.
5. Menguji aplikasi yang sudah dibuat untuk mendapatkan sebuah aplikasi yang bebas dari *error* dan sesuai dengan keinginan pemakai

3.2 Manfaat Penelitian

Pada umumnya data rencana kerja pembangunan desa dibuat dalam bentuk *hardcopy* ditingkat desa kemudian diberikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) untuk diverifikasi. Saat proses verifikasi, kegiatan yang diusulkan oleh desa disetujui/ ditolak. Pada penelitian ini akan dibuat sebuah aplikasi yang dapat melakukan input data rencana kerja secara *on-line* oleh desa kemudian diverifikasi secara *on-line* oleh pihak BPMD, hasil verifikasi disimpan lagi ke *database* desa. Antara desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki tampilan aplikasi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya dalam pengolahan keuangan desa. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan aplikasi ini adalah memungkinkan data disimpan secara elektronik sehingga meminimalkan penggunaan kertas. Keuntungan lainnya dengan aplikasi yang akan dibuat adalah pencarian data dan kontrol terhadap penggunaan keuangan desa dapat dilakukan dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keuntungan terakhir yang didapatkan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah desa adalah teroptimalkan penggunaan komputer bantuan pemerintah kepada setiap desa (dengan aplikasi pengontrolan pengelolaan keuangan desa maka penggunaan komputer yang

selama ini hanya digunakan untuk mengetik surat menyurat dapat dioptimalkan penggunaannya). Rincian dari manfaat yang dapat diperoleh adalah :

1. Aplikasi yang dibuat dapat menjamin konsistensi data terkait dengan pengelolaan keuangan desa
2. Melalui pembangunan aplikasi maka data disimpan secara elektronik, sehingga dapat meminimalkan kerusakan dan kehilangan data, disamping itu proses pencarian data dapat dilakukan dengan cepat
3. Dengan verifikasi secara online oleh Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) maka penggunaan kertas dapat diminimalkan
4. Hasil verifikasi oleh BPMD akan disimpan secara elektronik sehingga memungkinkan untuk mendapatkan historis tentang usulan kebutuhan anggaran oleh desa
5. Hasil verifikasi oleh BPMD ini dapat langsung diperbaiki pada aplikasi dan juga dapat dicetak setiap saat oleh desa
6. Melalui penggunaan aplikasi berbasis web dapat memberikan kemudahan kepada pimpinan daerah (Bupati) untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa yang *up to date* saat dibutuhkan (pimpinan daerah akan diberikan hak untuk *login* ke aplikasi tapi hanya sebatas untuk melihat data bukan untuk merubahnya)
7. Dengan aplikasi berbasis web maka dimungkinkan untuk transparansi pengelolaan keuangan desa
8. Aplikasi yang dibuat dapat menghasilkan/ mencetak laporan sesuai dengan format yang ada. Operator kantor desa tidak direpotkan lagi dengan pembuatan laporan
9. Sistem yang digunakan untuk melakukan input dan pembacaan data keuangan desa tidak bergantung pada suatu produk *software* tertentu

BAB 4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu tinjauan pustaka, analisa kelemahan, kebutuhan dan kelayakan sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe aplikasi, pengujian prototipe aplikasi, implementasi dan sosialisasi serta evaluasi, pelatihan penggunaan aplikasi kepada pemakai. Penjabaran dari langkah-langkah penelitian tersebut yaitu :

1. **Pengumpulan data**, langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah mendapatkan data tentang :
 - Model pengelola keuangan desa yang ada dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
 - Cara pembuatan rencana kerja pembangunan (RKP) yang ada didesa
 - Cara melakukan verifikasi data rencana kerja pembangunan desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)
 - Bentuk/ format berbagai macam laporan pertanggung jawaban keuangan yang di buat oleh setiap Desa.

Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan survei ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Kantor Desa. Keluaran dari tahapan ini adalah diperolehnya data tentang berbagai kegiatan dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terkumpulnya data pengelolaan dan penggunaan keuangan desa, diketahuinya cara pembuatan rencana kerja pembangunan (RKP) yang ada didesa, diketahuinya cara melakukan verifikasi data rencana kerja pembangunan desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), diperolehnya bentuk/ format berbagai macam laporan pertanggung jawaban keuangan yang di buat oleh setiap Desa serta teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem lama (sistem yang berjalan saat ini)

2. **Studi literatur**, untuk menemukan filosofis dan teori-teori mengenai implementasi sistem, model aplikasi berbasis web, perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, serta untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan - permasalahan yang sering muncul dalam implementasi sistem. Keluaran dari tahapan ini adalah diperolehnya daftar permasalahan dan teknik-teknik

pemecahan terhadap permasalahan dalam implementasi sistem untuk pengelolaan keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah teridentifikasinya permasalahan-permasalahan dan teknik-teknik pemecahan permasalahan dalam implementasi sistem untuk pengelolaan dan penggunaan keuangan desa.

3. **Analisa sistem**, untuk melakukan analisis kelemahan pada sistem pengelolaan keuangan yang telah ada, analisis kebutuhan dan kelayakan teknologi untuk pengembangan sistem. Keluaran dari tahapan ini adalah data rencana kerja desa, sistem pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini, daftar kebutuhan dan kelayakan dalam pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah teridentifikasinya kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan yang lama, daftar rencana kerja pembangunan yang ada didesa, analisis terhadap hasil verifikasi data rencana kerja pembangunan desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), cara pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan yang harus dibuat oleh desa, serta kebutuhan dan kelayakan terhadap pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa.

4. **Perancangan sistem**, Dalam melakukan perancangan sistem ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni :

a) Identifikasi kebutuhan sistem

Pada sub tahapan ini dideskripsikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Kebutuhan sistem ini menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem yang baru. Keluaran dari tahapan ini adalah pendefinisian kemampuan yang harus dimiliki oleh aplikasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah:

- Terciptanya arsitektur sistem yang baru
- Teridentifikasinya input dan output sistem

b) Pemodelan aplikasi *server* dan *client* menggunakan *Data Flow Diagram (DFD)*

Aktifitas yang dilakukan oleh kantor desa adalah melakukan entri data Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa dan Kantor BPMD melakukan verifikasi. Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan yang harus

dipenuhi oleh aplikasi, yang menyatakan hubungan interaksi antara sistem dan pengguna. Keluaran dari tahapan ini adalah model komunikasi pengguna dengan aplikasi yang ada di Kantor Desa dan BPMD. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah tergambarannya komunikasi antara pemakai dengan aplikasi menggunakan *Data Flow Diagram (DFD)*

c) Perancangan basis data

Pada tahap ini akan diidentifikasi kebutuhan basis data selanjutnya digambarkan model *Entity Relationship Diagram (ERD)*. Keluaran dari tahapan ini adalah teridentifikasinya tabel-tabel yang dibutuhkan oleh aplikasi sesuai kebutuhan organisasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah teridentifikasi proses bisnis dan tergambarannya model *Entity Relationship Diagram (ERD)*

d) Perancangan antar muka (*interface*) aplikasi *server* dan *client*

Pada sisi input aplikasi *client* rancangan *interface* dalam bentuk *form* dan pada sisi output dalam bentuk tampilan laporan. Rancangan yang dilakukan dalam tahap ini terbatas pada *form* dan rancangan laporan. Keluaran dari tahapan ini adalah tergambarannya rancangan *form* dan output (laporan). Target atau indikator keberhasilan adalah terciptanya :

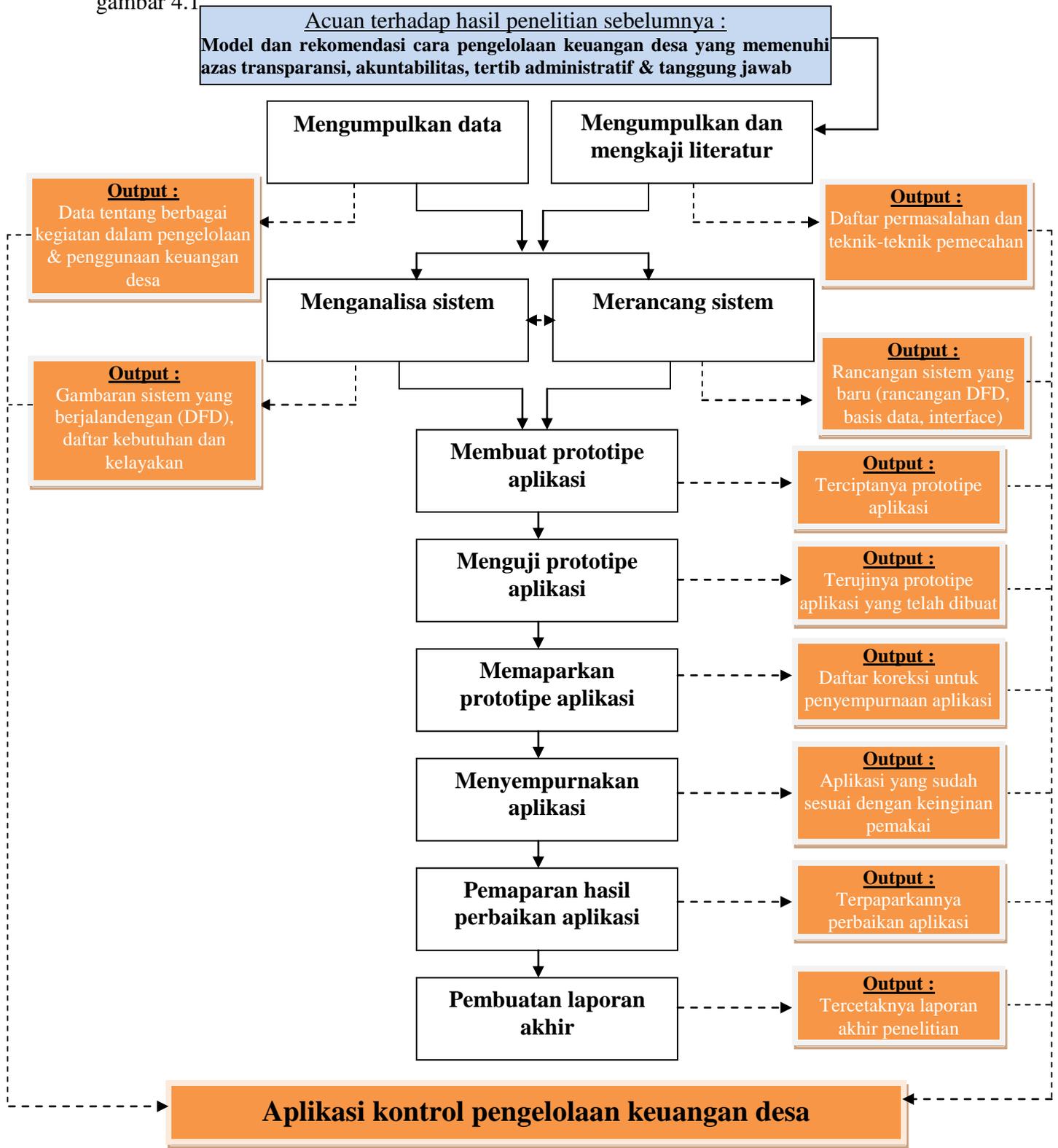
- Desain tampilan (*interface*) untuk aplikasi yang digunakan oleh Kantor Desa dan Kantor BPMD
- Rangan output sistem (laporan)

5. **Pembuatan prototipe aplikasi**, pada tahap ini akan dibuat prototipe aplikasi pengelolaan keuangan desa. Tahapan ini merupakan implemetasi hasil rancangan ke dalam bahasa program. Keluaran dari tahapan ini adalah terciptanya protipe aplikasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terwujudnya sebuah prototipe aplikasi pengelolaan keuangan desa baik input maupun output yang digunakan oleh pihak Kantor Desa dan Kantor BPMD.
6. **Pengujian prototipe aplikasi**, pada tahap ini akan dilakukan pengujian prototipe aplikasi yang telah dibuat. Keluaran dari tahapan ini adalah terujinya prototipe aplikasi yang telah dibuat sehingga aplikasi benar-benar terbebas dari kesalahan

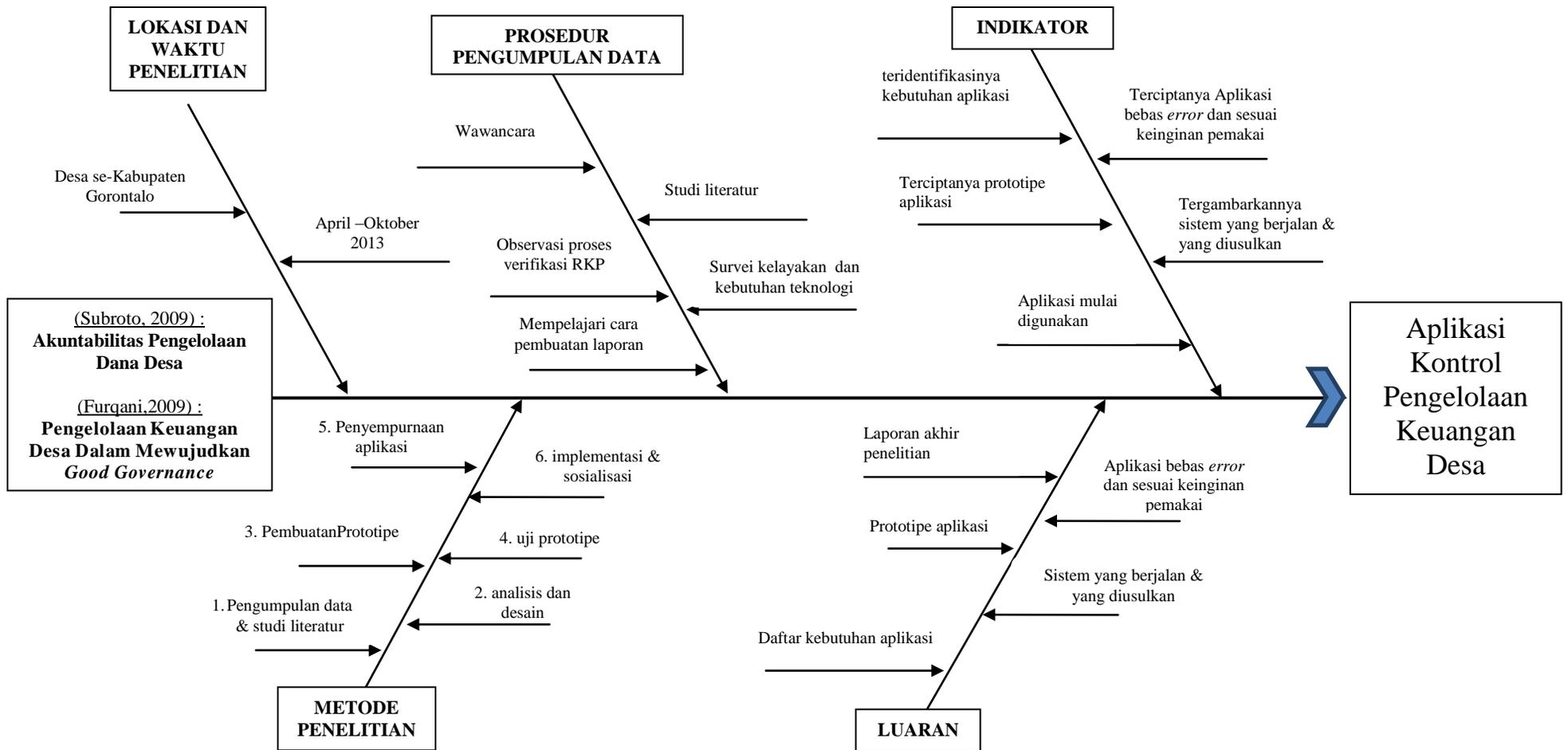
logika. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terwujudnya prototipe aplikasi yang telah diuji dengan baik.

7. **Pemaparan prototipe aplikasi**, tahap ini akan dipaparkan prototipe aplikasi ke operator/ pegawai Kantor Desa dan BPMD. Tahap ini ditujukan untuk mendapatkan informasi/ koreksi/ masukan/ perbaikan aplikasi dari pihak pemakai (operator/ pegawai Kantor Desa dan BPMD). Keluaran dari tahap ini adalah informasi dari pihak pemakai berupa koreksi/ masukan untuk perbaikan/ penyempurnaan aplikasi yang sesuai dengan proses bisnis dan keinginan dari pemakai. Target atau indikator keberhasilan adalah daftar koreksi aplikasi yang sesuai kebutuhan organisasi (proses bisnis).
8. **Penyempurnaan aplikasi**, Pada tahap ini akan dilakukan penyempurnaan aplikasi yang telah dibuatkan prototipenya berdasarkan masukan dan koreksi dari pemakai. Keluaran dari tahap ini adalah aplikasi yang sudah sesuai dengan proses bisnis dan keinginan pemakai. Target atau indikator keberhasilan adalah terciptanya aplikasi yang sesuai kebutuhan organisasi (proses bisnis) dan keinginan pemakai.
9. **Pemaparan hasil perbaikan aplikasi**, Pada tahap ini aplikasi yang sudah diperbaiki akan dikonsultasikan lagi dengan pihak Kantor Desa dan Kantor BPMD. Keluaran dari tahapan ini adalah terkonsultasikannya hasil perbaikan aplikasi pengelolaan keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah telah dipaparkannya hasil perbaikan aplikasi ke Kantor Desa dan Kantor BPMD.
10. **Pembuatan laporan**
Tahap akhir dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pembuatan laporan akhir penelitian dan dipublikasikannya hasil penelitian. Keluaran dari tahap ini adalah laporan akhir dan proceedings. Target atau indikator keberhasilan adalah tercetaknya laporan akhir penelitian dan hasil penelitian telah dipublikasi.

Penjabaran langkah-langkah penelitian dalam bentuk bagan ditampilkan pada gambar 4.1



Gambar 4.1 Bagan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian



Gambar 4.2 Fishbone diagram untuk tahapan penelitian

BAB 5. HASIL YANG DICAPAI

5.1 ANALISA SISTEM

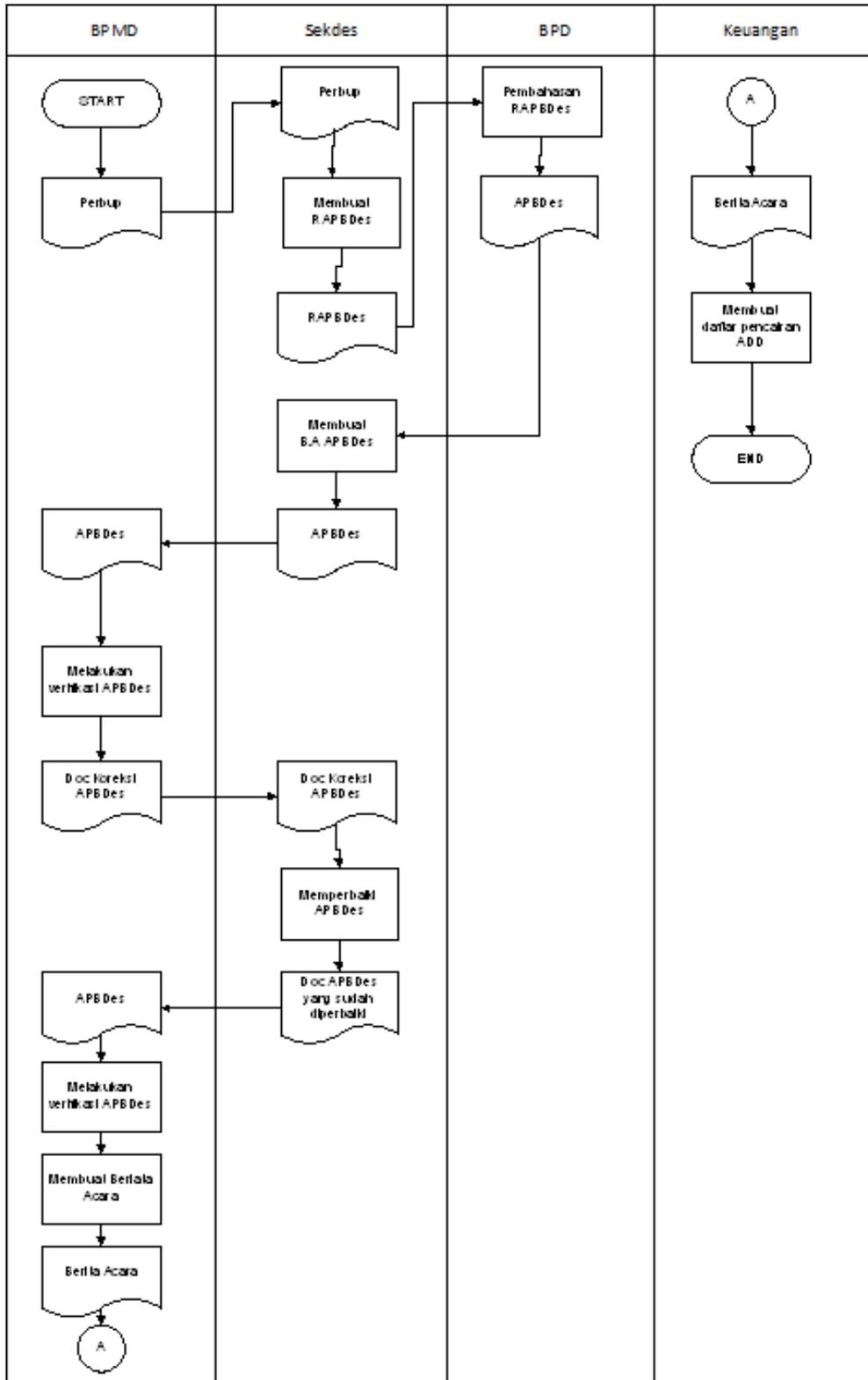
5.1.1 Analisa Sistem Berjalan

Uraian (cara kerja) untuk sistem yang ada saat ini adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengeluarkan hasil pembahasan APBD tingkat Kabupaten Gorontalo. Keluaran dari Hasil pembahasan APBD ini diantaranya jumlah ADD (alokasi dana desa) yang dialokasikan untuk setiap Desa se Kabupaten Gorontalo. Jumlah ADD berbeda untuk desa yang satu dengan yang lain tergantung jumlah penduduk dan luas desa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Mengeluarkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa yang lampirannya berisi jumlah/ besaran ADD yang diterima oleh setiap desa
3. Sekertaris Desa menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes berisi pendapatan dan belanja desa. Pendapatan desa bersumber dari PAD, ADD, dan sumbangan/ hibah pihak ke 3
4. Hasil dari RAPBDes akan di bahas/ di musyawarahkan (untuk mendapat persetujuan) dengan :
 - Tokoh masyarakat
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
5. Setelah RAPBDes dibahas maka akan dihasilkan APBDes yang siap diusulkan ke BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Gorontalo. APBDes yang diusulkan ke BPMD harus melampirkan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang APBDes
6. BPMD Kabupaten Gorontalo akan memverifikasi RAPBDes tersebut
7. Hasil perubahan/ verifikasi yang telah dibuat oleh BPMD Kabupaten Gorontalo kemudian akan diperbaiki lagi oleh pihak desa
8. Hasil Perbaikan yang telah dibuat oleh Desa dimasukan lagi ke BPMD. Bila hasil perbaikan yang dibuat oleh desa sudah sesuai dengan hasil verifikasi sebelumnya maka pihak BPMD Kabupaten Gorontalo akan mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi

9. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi akan diserahkan oleh pihak BPMD ke Pihak Desa dan DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sebagai bukti bahwa ADD dari desa tersebut sudah bisa dicairkan.
10. Pihak Desa akan menyerahkan tembusan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi ke Pihak Kecamatan. Pihak Kecamatan akan mengeluarkan Surat Keputusan Camat tentang Pengesahan Peraturan Desa APBDes.
11. Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi dari BPMD, kepala Desa akan mengeluarkan Peraturan Desa Tentang APBDes. Disamping itu juga, Kepala Desa membuat SK tentang Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri Dari :
 - Kepala Desa selaku pengguna anggaran
 - Sekdes selaku koordinator penggunaan keuangan
 - Bendahara selaku pengelola keuangan

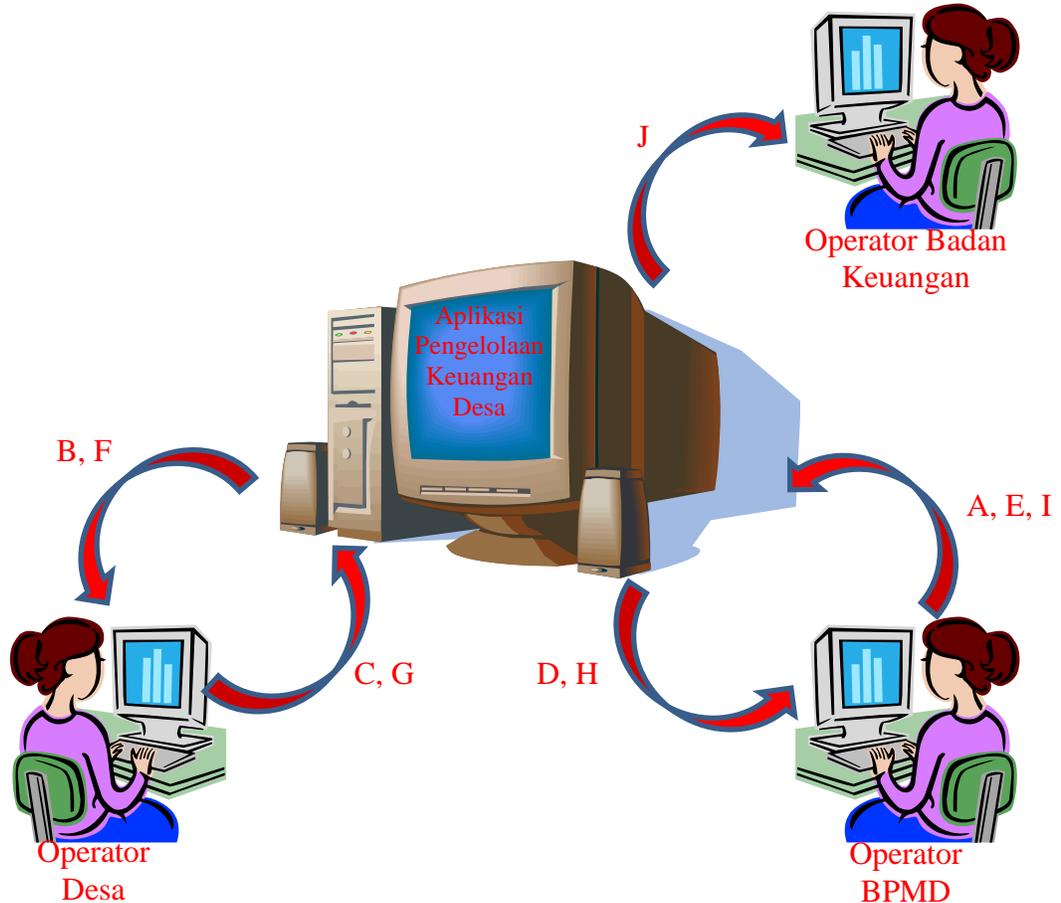
Penggambaran sistem yang saat ini berjalan terlihat pada gambar 5.1



Gambar 5.1 Analisa Sistem Berjalan

5.1.2 Arsitektur Sistem yang Diusulkan

1. Arsitektur sistem yang diusulkan untuk pembuatan kode rekening oleh BPMD dan pembuatan RAPBdes oleh Desa terlihat pada gambar 5.2



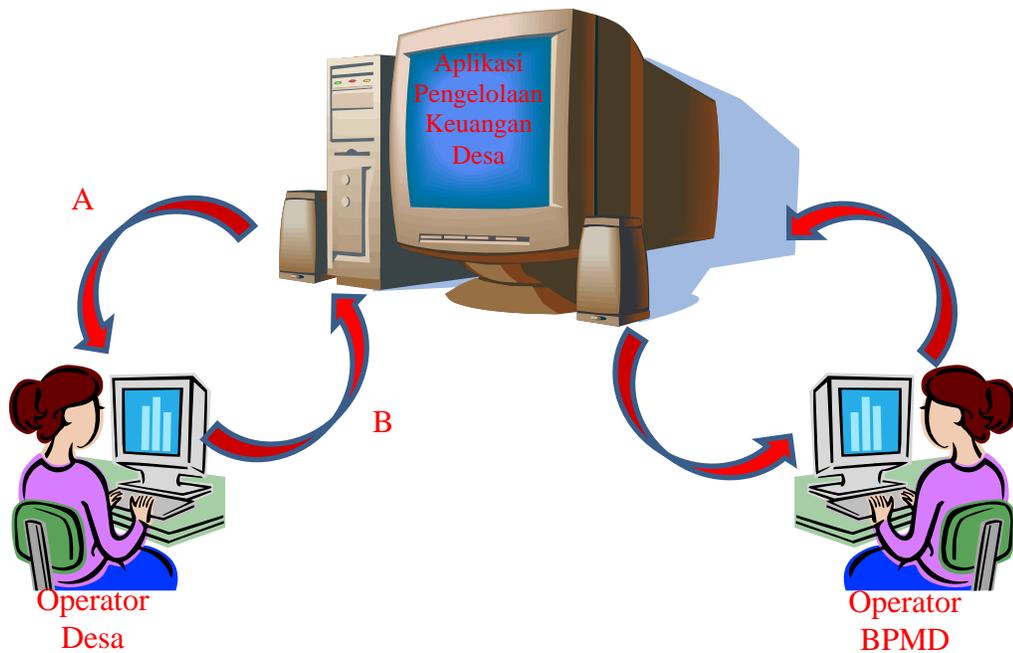
Gambar 5.2 Pembuatan usulan RAPBDes

Keterangan gambar :

- a) Operator BPMD melakukan input kode rekening dan uraiannya kemudian mempublish kode rekening tersebut supaya bisa terbaca oleh semua desa
- b) Operator kantor desa membuat RAPBDes berdasarkan rekening dan uraian yang diinput oleh operator BPMD
- c) Operator Kantor desa mengirimkan hasil RAPBDes ke BPMD untuk diverifikasi.
- d) Operator BPMD mengambil data RAPBDes untuk dilakukan verifikasi.
- e) Operator BPMD mengirimkan hasil verifikasi tersebut untuk diperbaiki lagi oleh desa
- f) Operator desa memperbaiki RAPBDes berdasarkan koreksi/ verifikasi oleh BPMD

- g) Operator desa mengirimkan kembali RAPBDes hasil perbaikan
- h) Operator BPMD memeriksa kembali RAPBDes yang telah diperbaiki oleh desa
- i) Bila hasil perbaikan RAPBDes yang telah dilakukan oleh desa sesuai dengan verifikasi maka BPMD akan menyetujui RAPBDes tersebut
- j) Operator Badan Keuangan Pemda Kab. Gorontalo mengambil data dari aplikasi, mana saja desa yang RAPBDesnya sudah disetujui oleh BPMD dan siap untuk dicairkan ADD.

2. Arsitektur sistem yang diusulkan untuk pemrosesan data uang masuk dan penggunaan keuangan desa, terlihat pada gambar 5.3



Gambar 5.3 Penggunaan keuangan desa

Keterangan gambar :

- a) Operator desa mengambil data RAPBDes dari aplikasi
- b) Operator desa menginput penerimaan dan penggunaan keuangan desa berdasarkan RAPBDes yang telah disetujui (RAPBDes yang telah disetujui tidak dapat diubah oleh pihak desa tanpa izin operator BPMD karena aplikasi sudah terproteksi otomatis), sehingga desa dalam pengelolaan keuangan desa sudah berdasarkan perencanaan yang telah dibuat saat pengajuan RAPBDes

- c) Operator BPMD dapat melihat RAPBDes yang diusulkan untuk diubah (perubahan harus sepengetahuan BPD dari desa tersebut)
- d) Operator BPMD melakukan perubahan RAPBDes sesuai dengan permohonan desa dan disetujui oleh BPD desa tersebut

5.1.3 Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan harus mampu :

1. Menangani pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang dikerjakan oleh desa
2. Menangani proses verifikasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)
3. Memproteksi penggunaan anggaran oleh desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disetujui dan diverifikasi oleh Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Menghasilkan output (laporan) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 (Laporan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu penerimaan, buku kas pembantu pengeluaran)

Uraian sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut

1. Operator Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) menginput data kode rekening dan uraian kegiatan
2. Hasil inputan kode rekening dan uraian kegiatan akan digunakan oleh Setiap kantor desa untuk memasukan anggaran yang dibutuhkan untuk setiap uraian kegiatan. Dalam kegiatan ini pihak desa membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang telah dibuat oleh desa akan dilakukan verifikasi secara online oleh pihak Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)
4. Hasil verifikasi akan diperbaiki lagi oleh desa kemudian diusulkan lagi ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)
5. Hasil perbaikan RAPBDes yang telah dilakukan oleh desa akan diverifikasi lagi oleh Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) untuk memastikan hasil

koreksi/ verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya apakah sudah diperbaiki. Bila sudah diperbaiki maka Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) akan membuat berita acara hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan lainnya dari pemerintah daerah siap dicairkan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

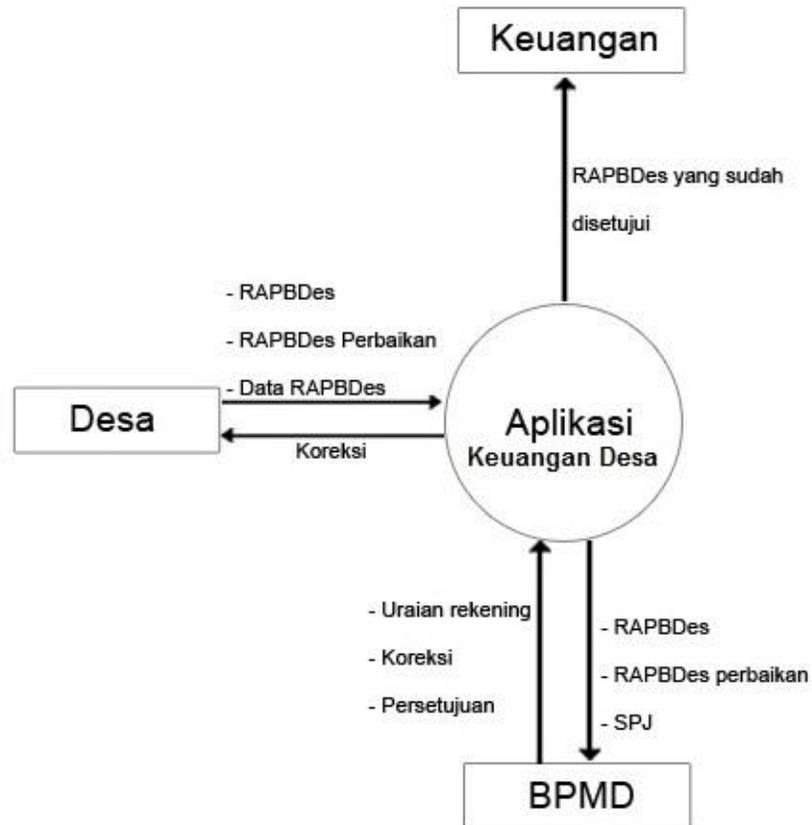
6. Untuk menggunakan/ membelajakan uang tersebut pihak kantor desa harus menyesuaikan dengan usulan APBDes yang telah disetujui oleh Kantor BPMD. Pada sistem yang dibuat ini, pihak desa tidak dapat merubah uraian kegiatan dan besaran dana untuk setiap uraian tersebut karena telah terproteksi secara otomatis saat Pihak BPMD menyetujui APBDes.
7. Melaporkan penggunaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 (Laporan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu penerimaan, buku kas pembantu pengeluaran)

5.2 DESAIN SISTEM

5.2.1 Desain Sistem Secara Umum

A. Diagram konteks

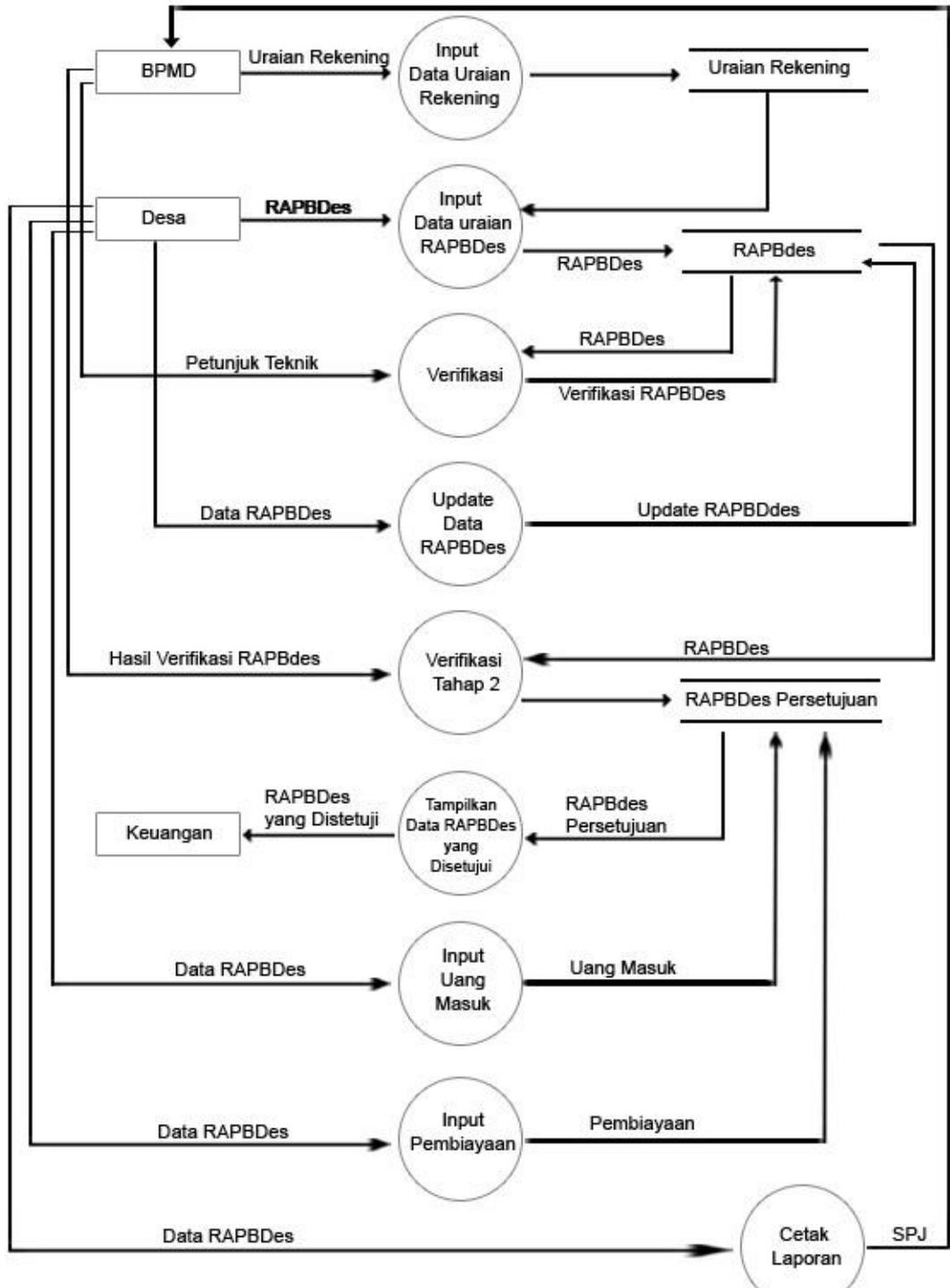
Diagram konteks untuk sistem yang diusulkan terlihat pada gambar 5.4



Gambar 5.4 Diagram Konteks

B. DAD level 0

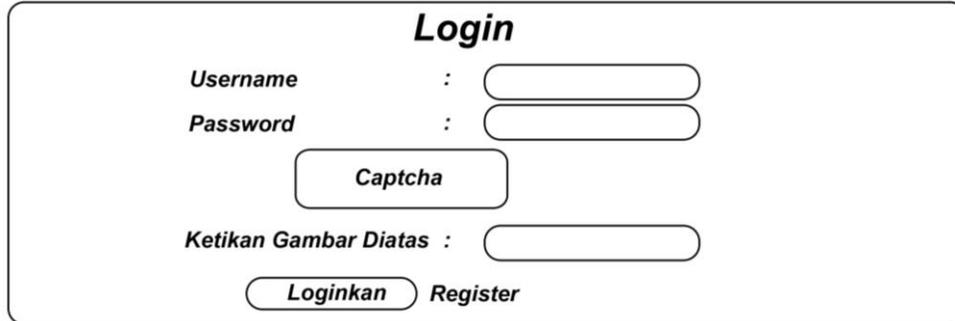
Gambar 5.5 menunjukkan detail proses yang ada pada diagram konteks



Gambar 5.5 DAD Level 0

5.2.2 Desain Input

Untuk aplikasi pengelolaan keuangan desa desain inputnya dimulai dari desain input untuk form login seperti terlihat pada gambar 5.6. form login ini berada pada aplikasi untuk kantor desa, Badan keuangan, dan Kantor BPMD. Desain input sangat bermanfaat untuk memudahkan saat implementasi hasil desain ke bahasa program.



Login

Username :

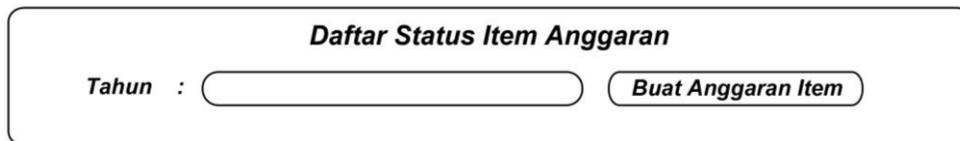
Password :

Ketikan Gambar Diatas :

Gambar 5.6 Tampilan desain input untuk form login

A. Desain input untuk aplikasi BPMD

Aplikasi yang digunakan oleh kantor BPMD dimulai dari desain form memasukan tahun anggaran untuk pembuatan kode rekening dan uraian, desain formnya terlihat pada gambar 5.7



Daftar Status Item Anggaran

Tahun :

Gambar 5.7 Desain form input tahun anggaran

Untuk membuat kode rekening dan uraian, gambar 5.8 adalah desain form untuk pemasukan data kode rekening dan uraian berdasarkan tahun anggaran. Desain form ini terdiri dari 3 inputan yakni : anak adalah sub kode rekening, saudara adalah kode rekening yang setara, dan hapus adalah menghapus kode rekening dan uraiannya



Buat Item Anggaran Tahun 2012

1.

Gambar 5.8 Tampilan form input rekening

Desain form untuk melihat status proposal yang telah dibuat oleh kantor Desa dapat dilihat pada gambar 5.9

Status Proposal Item Anggaran	
Tahun	Action
2013	Lihat
2012	Lihat

Gambar 5.9 Tampilan desain form status proposal per tahun anggaran
 Status proposal yang telah dibuat oleh setiap desa dapat dilihat pada gambar 5.10

Desa	Status	Action
Mongolato	Disetujui	Proposal Ttelah Disetujui Lihat
Dutulanaa	Belum Disetujui	Desa Belum Mengajukan Proposal
Bulila	Belum Disetujui	Desa Belum Mengajukan Proposal
Bina Jaya	Belum Disetujui	Desa Belum Mengajukan Proposal
Ulapato - A	Belum Disetujui	Desa Belum Mengajukan Proposal
Yosonegoro	Belum Disetujui	Desa Belum Mengajukan Proposal

Gambar 5.10 Desafi form status proposal desa

B. Desain input untuk aplikasi Kantor Desa

Untuk melakukan input data RAPBDes desa dapat melihat terlebih dahulu kode rekening dan uraian yang sudah diinput oleh kantor BPMD kemudian menginput anggaran beserta uraian kegiatan pada level 5, gambar 5.11 menunjukkan tampilan desain form untuk menginput data RAPBDes

Anggaran Item Tahun 2012

1. Pendapatan

1.1. PAD

1.1.1. Pasar Hewan	0
1.1.2. Pasar Sayur	0

2. Pembiayaan

2.1. Beli ATK	0
---------------	---

Gambar 5.11 Tampilan form input RAPBDes

Status proposal/ RAPBdes yang sudah dibuat dan disimpan masih bisa diedit (sebelum mendapat persetujuan dari BPMD) atau pihak desa dapat langsung mengirim RAPBdes tersebut untuk diverifikasi oleh BPMD. Gambar 5.12 menunjukkan desain form status RAPBDes.

Status Proposal Item Anggaran

Tahun	Status	Action
2013	Disetujui	Lihat
2012	Didesa	Edit Kirim ke BPMD

Gambar 5.12 Tampilan desain form status RAPBDes

Gambar 5.13 menunjukan bahwa setelah RAPBDesdibuat dan di klik tombol kirim ke BPMD maka pihak desa dapat melihat status proposalnya (sedang di verifikasi oleh pihak BPMD)

Status Proposal Item Anggaran

Tahun	Status	Action
2013	Disetujui	Lihat
2012	Didesa	Sedang Diverifikasi BPMD Edit

Gambar 5.13 Tampilan status RAPBDes dalam proses verifikasi

C. Aplikasi di tingkat BPMD untuk verifikasi/ koreksi usulan Desa

Proses verifikasi yang dilakukan oleh BPMD diperlihatkan pada gambar 5.14 dan 5.15, setiap uraian kegiatan dan anggaran yang diajukan melalui RAPBDes oleh desa akan diverifikasi oleh desa.

The screenshot shows a form titled "Edit Anggaran Item Tahun 2012". It contains the following fields and values:

- 1. Pendapatan : 0
- 1.1. PAD : 0
- 1.1.1. Pasar Hewan : 100000
- 1.1.2. Pasar Sayur : 100000
- 2. Pembiayaan : 0
- 2.1. Beli ATK : 50000

There is a "Validasi" button at the bottom left.

Gambar 5.14 Desain form proses verifikasi oleh BPMD

The screenshot shows the same form as Gambar 5.14, but with additional correction amounts:

- 1.1.1. Pasar Hewan : 50000 Koreksi : 50000
- 1.1.2. Pasar Sayur : 750000 Koreksi : 750000
- 2.1. Beli ATK : 50000 Koreksi : 20000

The "Validasi" button is still present at the bottom left.

Gambar 5.15 Desain form input hasil verifikasi

D. Aplikasi ditingkat keuangan untuk pencairan ADD

Kantor Badan Keuangan diberikan login untuk melihat informasi desa mana saja yang RAPBDesnya sudah disetujui (untuk proses pencairan ADD). Gambar 5.16 menunjukkan tampilan form informasi status RAPBDes.

Status Proposal Item Anggaran Tahun 2012		
Desa	Status	Action
Mongolato	Disetujui	Proposal Ttelah Disetujui Lihat
Dutulanaa	Belum Disetujui	Desa Belum Mengajukan Proposal
Bulila	Belum Disetujui	Desa Belum Mengajukan Proposal
Bina Jaya	Belum Disetujui	Desa Belum Mengajukan Proposal
Ulapato - A	Belum Disetujui	Desa Belum Mengajukan Proposal
Yosonegoro	Belum Disetujui	Desa Belum Mengajukan Proposal

Gambar 5.16 Tampilan form informasi status RAPBDes

5.2.3 Desain Output

Tampilan hasil desain output/ laporan diawali dengan desain form untuk berinteraksi dengan berbagai macam laporan. Pada form yang terlihat pada gambar 5.17 terdiri dari tahun, status laporan desa, action untuk laporan desa, dan jenis laporan desa.

Status Laporan Desa			
Tahun	Status	Action	Buat laporan
2013	Belum_Final	Edit Final	Buku Kas Umum ▾ Januari ▾ Buat
2013	Belum_Final	Edit Final	Buku Kas Umum ▾ Januari ▾ Buat

Gambar 5.17 Tampilan status laporan desa

Untuk melakukan penginputan data/ penggunaan anggaran sesuai dengan RAPBDes yang telah dibuat, rancangan yang ditampilkan pada gambar 5.18 menunjukkan form untuk melakukan input data belanja kegiatan. Dalam melakukan proses belanja barang/ kegiatan maka aplikasi sudah melakukan proteksi terhadap belanja anggaran yang harus dibelanjakan oleh setiap desa (sesuai RAPBDes)

Detail Item

No
Tanggal
Kode Rekening
Nama
Penerimaan
Pengeluaran
Action

Kode Rekening : 1.1.1.
Jenis : Pendapatan

NO

Tanggal

No_Bukti

Jumlah

Sisa Anggaran : 50000
Tambah

Gambar 5.18 Tampilan form detail belanja kegiatan

Rancangan form untuk melihat belanja desa atas kegiatan setiap bulannya terlihat pada desain laporan seperti terlihat pada gambar 5.19

[Download Sebagai PDF](#)

BUKU KAS UMUM
DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
			Saldo bulan lalu	0.00	
			Jumlah	0.00	0.00
			Jumlah Bulan ini	0.00	0.00
			Jumlah s/d Bulan lalu	0.00	0.00
			Jumlah s/d Bulan ini	0.00	0.00
			Sisa Kas		0.00
			Pada hari ini 31 January 2012 oleh kami didapat dalam kas		
			Rp. 0.00		
			0		
			Terdiri dari :		
			Tunai	0.00	
			Saldo Bank	-	
			Surat Berharga	-	
		Mengetahui, KEPALA DESA		Mongoloto, 31 January 2012 BENDAHARA DESA	

Gambar 5.19 Tampilan desain laporan buku kas umum

Desain untuk buku kas harian pembantu terlihat pada gambar 5.20. buku kas harian pembantu digunakan untuk menampilkan informasi tentang belanja harian yang dilakukan oleh desa.

[Download Sebagai PDF](#)

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Saldo bulan lalu	0.00		
		Mengetahui, KEPALA DESA		Mongoloto, 31 January 2012 BENDAHARA DESA	
		Hi. Maswin Otaya		Sahria Usman	

Gambar 5.20 Tampilan desain laporan buku kas harian pembantu

Rancangan laporan untuk buku kas pembantu penerimaan dan pengeluaran terlihat pada gambar 5.21 dan 5.22

[Download Sebagai PDF](#)

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NO BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NO STS DAN BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	Jumlah Bulan ini			0.00
	Jumlah s/d Bulan lalu			0.00
	Jumlah s/d Bulan ini			0.00
Mengetahui, KEPALA DESA Hi. Maswin Otaya			Mongolato, 31 January 2012 BENDAHARA DESA Sahria Usman	

Gambar 5.21 Tampilan desain laporan buku kas pembantu penerimaan

[Download Sebagai PDF](#)

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NO BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NO SPP DAN BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	Jumlah Bulan ini			0.00
	Jumlah s/d Bulan lalu			0.00
	Jumlah s/d Bulan ini			0.00
Mengetahui, KEPALA DESA Hi. Maswin Otaya			Mongolato, 31 January 2012 BENDAHARA DESA Sahria Usman	

Gambar 5.22 Tampilan desain laporan buku kas pembantu pengeluaran

5.2.4 Desain Database

Untuk menyimpan hasil inputan data dan memudahkan data yang disimpan dapat diambil dengan mudah dan cepat maka diperlukan sebuah database dan tabel untuk mengorganisir data tersebut.

Tabel 5.1 menunjukkan tabel untuk menyimpan informasi tentang inputan data terkait dengan jumlah dana untuk setiap uraian kegiatan yang dilakukan oleh desa

Tabel 5.1 Anggaran untuk uraian kegiatan

No	Nama	Type	Length	Index
1	tahun	Integer	4	Primary
2	kodrek_ortu	Integer	10	Foreign
3	Kodrek	Integer	10	Foreign
4	Level	Integer	5	Foreign
5	desa_id	Integer	4	Foreign
6	jumlah	Begint	10	
7	status	Enum	0	
8	koreksi	Text	0	

Tabel 5.2 menunjukkan tabel untuk menyimpan informasi tentang kode rekening dan uraian yang di input oleh kantor BPMD

Tabel 5.2 Item anggaran

No	Nama	Type	Length	Index
1	tahun	Integer	4	Primary
2	kodrek_ortu	Integer	10	Foreign
3	Kodrek	Integer	10	Foreign
4	Level	Integer	5	Foreign
5	kode_string	Varchar	50	
6	nama	Varchar	200	
7	active	Enum	0	

Untuk menyimpan data tentang desa dan kecamatan maka rancangan tabel ditunjukkan pada tabel 5.3 dan 5.4

Tabel 5.3 Desa

No	Nama	Type	Length	Index
1	desa_id	Integer	4	Primary
2	desa_nama	Varchar	50	
3	kec_id	Integer	4	
4	kades	Varchar	200	
5	bandes	Varchar	200	

Tabel 5.4 Kecamatan

No	Nama	Type	Length	Index
1	kec_id	Integer	4	Primary
2	kec_nama	Varchar	50	

Data penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan disimpan pada tabel seperti terlihat pada tabel 5.5. penggunaan anggran tersebut berdasarkan besaran anggaran yang sudah direncanakan pada RAPBDes

Tabel 5.5 penggunaan anggaran

No	Nama	Type	Length	Index
1	no	Integer	4	
2	desa_id	Integer	4	
3	tanggal	Date	0	
4	tahun	Integer	4	
5	kodrek_ortu	Integer	10	
6	kodrek	Integer	10	
7	level	Integer	5	
8	jumlah	bigint	10	
9	no_bukti	Varchar	100	

Setiap user yang berinteraksi dan diberi hak (diberi izin) oleh admin untuk menggunakan aplikasi ini maka harus teregistrasi terlebih dahulu. Registrasi user disimpan pada tabel yang tampak pada tabel 5.6

Tabel 5.6 User aplikasi

No	Nama	Type	Length	Index
1	user_id	Integer	11	Primary
2	username	Varchar	20	
3	password	Varchar	32	
4	jenis_user	enum	0	
5	desa_id	Integer	4	
6	photo	Varchar	50	
7	ktp_img	Varchar	50	
8	nama_lengkap	Varchar	50	
9	alamat	Varchar	150	
10	telepon	Varchar	15	
11	email	Varchar	50	
12	active	tinyint	1	

5.3 Implementasi Sistem

Penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari login terhadap aplikasi tersebut. Login dibagi menjadi 3 yakni :

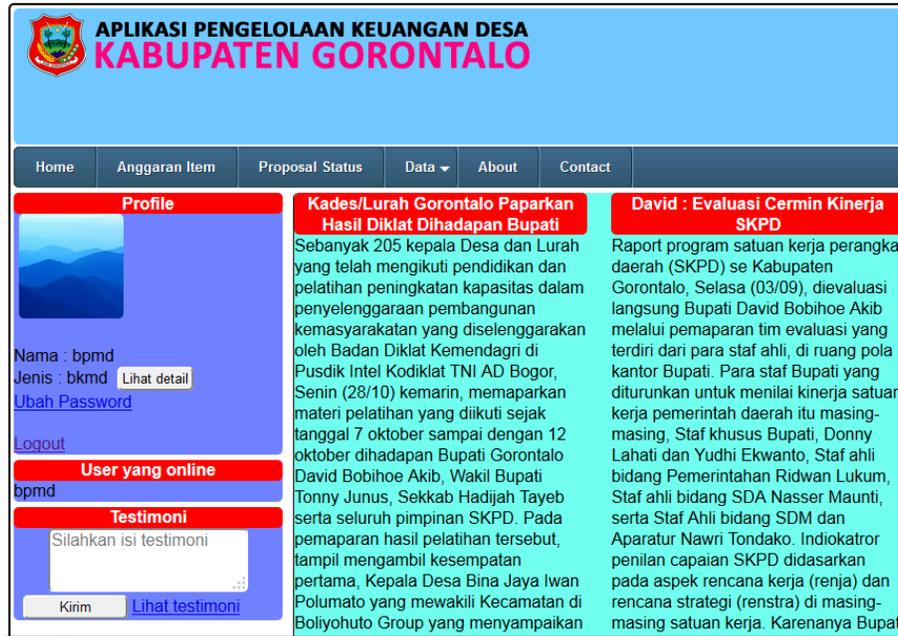
- Login untuk kantor BPMD (input data kode rekening dan uraian kegiatan serta verifikasi hasil inputan data RAPBDes oleh setiap desa)
- Login untuk kantor desa (input data RAPBDes dan perbaikan hasil verifikasi RAPBDes)
- Login untuk Badan Keuangan (untuk melihat desa mana saja yang sudah disetujui RAPBDesnya dan siap dicairkan anggaran)
- Login untuk admin (persetujuan user yang melakukan registrasi)

Tampilan untuk form login terlihat pada gambar 5.23

The image shows a login form with a red header containing the word "Login" in white. Below the header, there are four input fields: "Username :", "Password :", a fingerprint scanner icon with the text "d'p2" below it, and "Ketikkan gambar diatas :". At the bottom, there are two buttons: "Loginkan" and "Register".

Gambar 5.23 Tampilan form login

Bila login dilakukan dengan benar maka dilayar monitor akan tampak seperti pada gambar 5.24 (menjelaskan tentang menu utama untuk kantor BPMD), gambar 5.25 (menjelaskan tentang menu utama untuk kantor desa), gambar 5.26 (menjelaskan tentang menu utama untuk Badan Keuangan), gambar 5.27 (menjelaskan tentang menu utama untuk admin user)



Gambar 5.24 Menu utama untuk kantor BPMD

Pada gambar 5.24 terdiri menu anggaran item, status proposal, dan penginputan data desa dan kecamatan



Gambar 5.25 Menu utama untuk kantor desa

Pada gambar 5.25 terdiri dari menu proposal (untuk pembuatan RAPBDes) dan laporan (input penggunaan angrgan untuk setiap kegiatan sekaligus untuk pembuatan laporan)



Gambar 5.26 Menu utama untuk Badan Keuangan

Pada gambar 5.26 hanya terdapat satu menu yakni proposal (untuk melihat status RAPBDes desa mana saja yang sudah diverifikasi dan disetujui oleh BPMD)



Gambar 5.27 Menu utama untuk admin user

Setiap user yang melakukan registrasi maka akan diverifikasi oleh admin user seperti tampak pada gambar 5.27

5.3.1 Aplikasi Kantor BPMD

Aplikasi kantor BPMD dimulai dengan melakukan input data kecamatan (terlihat pada gambar 5.28), input data desa (terlihat pada gambar 5.29), input uraian kegiatan (terlihat pada gambar 5.30)

The screenshot shows the 'Tambah kecamatan' form. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Anggaran Item', 'Proposal Status', 'Data', 'About', and 'Contact'. Below the navigation bar, the page is split into two main sections: 'Profile' on the left and 'Tambah kecamatan' on the right. The 'Profile' section shows the user's name as 'bpm d', jenis as 'bkmd', and a 'Lihat detail' button. The 'Tambah kecamatan' section has a 'Tutup Form Kecamatan' button at the top, followed by the 'Data Kecamatan' section with a 'Nama kecamatan' input field and 'Tambah' and 'Reset' buttons. Below that is the 'Ubah kecamatan' section with an 'Ubah Kecamatan' button.

Gambar 5.28 Form input data kecamatan

The screenshot shows the 'Tambah Desa' form. It features the same navigation bar and profile sidebar as the previous form. The 'Tambah Desa' section has a 'Tutup Form Desa' button at the top, followed by the 'Data Desa' section. This section includes a 'Kecamatan' dropdown menu with 'Asparaga' selected, and three input fields for 'Nama Desa', 'Nama Kepala Desa', and 'Nama Bendahara'.

Gambar 5.29 Form input data desa

The screenshot shows the 'Buat Item Anggaran tahun 2011' form. It maintains the same navigation bar and profile sidebar. The 'Buat Item Anggaran tahun 2011' section has a '1.' label followed by an input field and three buttons: '+anak', '+saudara', and 'hapus'. Below this is a 'validasi' button.

Gambar 5.30 Form input data uraian kegiatan

5.3.2 Aplikasi Kantor Desa

Aplikasi kantor desa dapat melakukan input data RAPBDes melalui menu proposal. RAPBDes dapat dibuat sesuai kebutuhan desa misalnya penambahan uraian kegiatan dapat dilakukan oleh desa (bila uraian kegiatan yang diinput oleh BPMD ada yang tidak sesuai dengan uraian kegiatan didesa maka desa dapat melakukan penambahan uraian kegiatan tersebut). Pada gambar 5.31 menunjukkan form untuk menambah uraian kegiatan yang tidak sempat di input oleh BPMD padahal uraian kegiatan tersebut dibutuhkan oleh desa.

The screenshot shows the 'Anggaran Item Level 5 Tahun 2012' form. The left sidebar contains a profile section for 'pantungo' from 'desa Pantungo'. The main content area lists the following items with '+anak' buttons:

- 1. PENDAPATAN
 - 1.1. PENDAPATAN ASLI DESA
 - 1.1.1. Hasil Usaha Desa
 - 1.1.1.1. Hasil Usaha Desa +anak
 - 1.1.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
 - 1.1.2.1. Tanah Kas Desa +anak
 - 1.1.2.2. Pasar Desa +anak
 - 1.1.2.3. Pasar Hewan +anak
 - 1.1.2.4. Tambatan Perahu +anak

Gambar 5.31 Penambahan uraian kegiatan oleh desa

Untuk memasukan (menginput) data RAPBDes terlihat pada gambar 5.32. Pada gambar ini pihak desa akan menginput data jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan

The screenshot shows the 'Anggaran Item Tahun 2012' form. It features a table for inputting budget amounts for the years 2011 and 2012. The table has columns for 'Nama Item', 'Tahun 2011', and 'Tahun 2012'. The items listed are:

Nama Item	Tahun 2011	Tahun 2012
1. PENDAPATAN		
1.1. PENDAPATAN ASLI DESA		
1.1.1. Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1. Hasil Usaha Desa		
1.1.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1. Tanah Kas Desa	belum ada	0
1.1.2.2. Pasar Desa	belum ada	0
1.1.2.3. Pasar Hewan	belum ada	0
1.1.2.4. Tambatan Perahu	belum ada	0

Gambar 5.32 Form input anggran RAPBDes

Bila RAPBDes yang diajukan oleh desa sudah diverifikasi dan disetujui oleh pihak BPMD maka selanjutnya desa dapat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan di RAPBDes berdasarkan uraian kegiatan dan jumlah anggaran yang telah disetujui oleh BPMD. Gambar 5.33 menunjukkan form pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Hasil inputan data tersebut akan secara otomatis masuk sebagai laporan (baik untuk buku kas umum, buku kas pembantu harian, buku kas pembantu harisn untuk pendapatan dan pengeluaran)

Gambar 5.33 Tampilan form penggunaan anggaran

5.3.3 Aplikasi Badan Keuangan

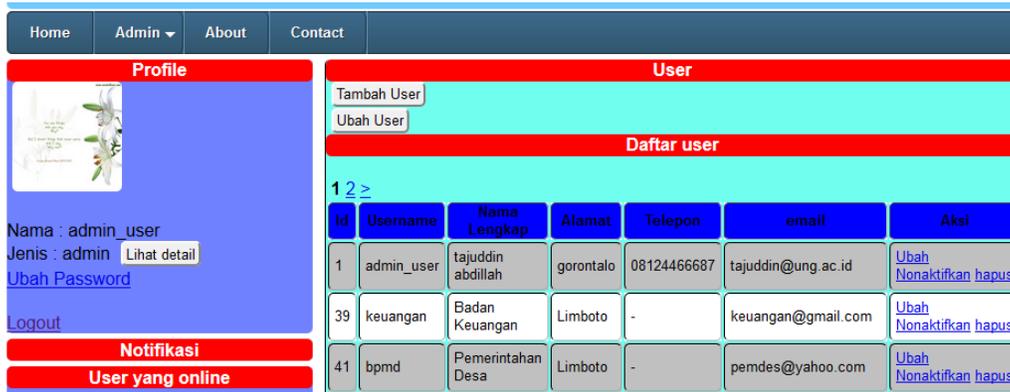
Aplikasi yang digunakan oleh Badan Keuangan hanya berfungsi untuk melihat desa mana saja yang RAPBDesnya sudah disetujui oleh pihak BPMD, sehingga dana siap untuk dicairkan. Gambar 5.34 menunjukkan form yang menampilkan informasi desa yang sudah disetujui RAPBDesnya

Desa	Status	Action
mongolato	disetujui	Proposal telah disetujui Lihat
dutulanaa	belum_diajukan	Desa belum mengajukan proposal
Bulila	didesa	Proposal sedang diperbaiki pihak desa Lihat
Bina Jaya	belum_diajukan	Desa belum mengajukan proposal
Ulapato-A	belum_diajukan	Desa belum mengajukan proposal
Yosonegoro	belum_diajukan	Desa belum mengajukan proposal
Pantungo	disetujui	Proposal telah disetujui Lihat

Gambar 5.34 Tampilan informasi persetujuan RAPBDes

5.3.4 Aplikasi Admin User

Penggunaan aplikasi ditingkat administrator user seperti tampak pada gambar 5.35. administrator user bertugas untuk menyetujui user yang melakukan registrasi, merubah status user yang sudah terdaftar, dan menghapus user dari aplikasi.



Gambar 5. 35 Tampilan aplikasi administrasi pengguna aplikasi

Berdasarkan uraian diatas maka perbandingan antara sistem yang lama dan yang baru terlihat pada tabel 5.7. Perbandingan ini diukur dari 3 hal yakni proses pencarian data ketika dibutuhkan, penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan, dan keamanan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dibuat memiliki keunggulan/ kelebihan dibanding sistem lama (sistem yang berjalan saat ini).

Tabel 5.7 Perbandingan sistem lama dan baru

NO	SISTEM LAMA	SISTEM BARU
1	Pencarian data usulan (RAPBDes) untuk tahun sebelumnya memakan waktu lama	Memudahkan pencarian data karena sistem yang baru memungkinkan mencari data dengan aplikasi
2	Penggunaan dana untuk setiap kegiatan kurang terdata dengan baik sehingga penggunaan keuangan sering mengalami kesalahan	Aplikasi dapat mengatur penggunaan dana untuk setiap kegiatan (sesuai perencanaan awal)
3	Kemanan data kurang terjamin	Aplikasi dapat melakukan proteksi untuk uraian kegiatan

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Desa dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Aplikasi yang dibangun pada Kantor Desa dapat menggantikan proses penyusunan anggaran manual (RAPBDes) sehingga dapat mempercepat perhitungan dan pertanggungjawaban anggaran secara cepat.
2. Dengan menggunakan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa ini laporan penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran lebih cepat karena adanya kontrol penggunaan anggaran sebelumnya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan kepada pihak BPMD, Desa, dan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo:

1. Untuk efektifitas dan efisiensi penyusunan RAPBDes dan penggunaan anggaran (pertanggung jawaban penggunaan anggaran) oleh desa maka pihak desa perlu memanfaatkan aplikasi pengelolaan keuangan desa.
2. Perlunya peningkatan sumber daya aparatur desa akan penguasaan pemanfaatan teknologi komputer secara serius (terutama pihak desa) sehingga penggunaan aplikasi tidak terpusat pada satu orang saja.
3. Perlunya peningkatan fasilitas komputer dan koneksi internet secara merata di tingkat desa untuk menunjang kinerja dari aplikasi.
4. Aplikasi yang telah dibuat perlu dikembangkan lagi, terutama untuk proses pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dibuat secara *online*

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana. A dan Suntoro. E, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.
- Furqani. A, 2009, Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada pemerintah Desa Kalimook Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep), *Tesis*, Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya
- [Http://www.berdikarionline.com/opini/20121001/kemandirian-pemerintahan-desa-dan-urgensi-uu-desa.html#ixzz2H40uZKrW](http://www.berdikarionline.com/opini/20121001/kemandirian-pemerintahan-desa-dan-urgensi-uu-desa.html#ixzz2H40uZKrW), diakses tanggal : 4 Januari 2013 pukul 14.30 Wita
- Kadir. A, 2009, *Mastering Ajax dan PHP*, Andi Offset, Yogyakarta
- Permendagri No.37, 2009, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/peraturan/menteri/tahun/2007>
- Subroto. A, 2009, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008), *Tesis*, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Supriyanto. A, 2005, “Pengantar Teknologi Informasi”, Salemba Infotek, Jakarta